

PERKEMBANGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) SEBAGAI KEKUATAN POLITIK DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2000-2015

Fanny Dwi Putra Pamungkas

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
fanny.17040284012@mhs.unesa.ac.id

Wisnu

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
wisnu@unesa.ac.id

Abstrak

Berlakunya reformasi regulasi tentang partai politik membuat geliat perkembangan partai politik di Indonesia menjadi sangat pesat. Lahirnya partai politik didasarkan oleh kebebasan masyarakat dalam mendirikan partai politik akibat dari sistem multipartai yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1999 sehingga sejak tahun tersebut ratusan partai dapat berdiri dengan bebas. Kejayaan Partai Kebangkitan Bangsa di Tingkat Nasional berlanjut pada adaptasi politik daerah, khususnya di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki basis masa Nahdlatul Ulama yang sangat besar sehingga menjadi partai politik penguasa.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian Kualitatif deskriptif dengan memilih cakupan daerah di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi basis masa kemenangan PKB Sidoarjo. Data primer pada penelitian ini didasarkan hasil wawancara oleh tokoh-tokoh pelaku dari PKB Sidoarjo ini selama kurun waktu tahun 2000-2015 yang disandingkan dengan beberapa dokumen atau arsip sebagai data sekunder dari penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yakni Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi Makna dan Historiografi.

Hasil penelitian yang data dihasilkan adalah adanya bukti otentik sinergitas yang dibangun oleh PKB Sidoarjo dan NU Sidoarjo dalam melaksanakan iklim politik di Kabupaten Sidoarjo. Sinergitas ini hanya sebatas pengaruh NU sebagai fasilitator berdirinya partai ini dan tidak menunjukkan kembai eksistensi NU untuk terjun kedalam lingkaran politik secara langsung. Kedua elemen penting tersebut menjadikan kontrol kondisi politik di Kabupaten Sidoarjo sebagai basis dari kekuatan NU di Jawa Timur. Pemanfaatan hubungan dan segala lini dari NU dan PKB Sidoarjo ini yang menjadikan PKB Sidoarjo menjadi partai tunggal penguasa panggung politik di Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci : Sinergitas Politik, Budaya Masyarakat, Politik.

Abstract

The enactment of regulatory reform on political parties has made the development of political parties in Indonesia very rapid. The birth of political parties is based on the freedom of society to establish political parties as a result of the multiparty system that was implemented in Indonesia in 1999 so that since that year hundreds of parties have been able to stand freely. The triumph of the National Awakening Party at the National Level continued in the adaptation of regional politics, especially in Sidoarjo Regency which had a very large Nahdlatul Ulama era base so that it became the ruling political party.

This research is a descriptive qualitative study by selecting the coverage area in Sidoarjo Regency which is the basis for the PKB Sidoarjo victory period. The primary data in this study are based on the results of interviews by the actors from PKB Sidoarjo during the 2000-2015 period, which are juxtaposed with several documents or archives as secondary data from this study. The method used is the historical research method, namely Heuristic, Source Criticism, Meaning Interpretation and Historiography.

The result of the research that the data produced is authentic evidence of the synergy built by PKB Sidoarjo and NU Sidoarjo in implementing the political climate in Sidoarjo Regency. This synergy is only limited to the influence of NU as a facilitator for the founding of this party and does not show the re-existence of NU to enter into political circles directly. These two important elements make the control of political conditions in Sidoarjo Regency the basis of NU's strength in East Java. Utilization of the relationship and all lines of NU and PKB Sidoarjo is what makes PKB Sidoarjo the sole party ruling the political stage in Sidoarjo Regency.

Keywords: Political Synergy, Community Culture, Politics.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemerintahan pada dewasa ini tidak dapat dipisahkan dari betapa besarnya Partai Politik yang menjadi tumpuan utama dari sebuah proses kontestasi dari Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini dapat di buktikan dengan keadaan Partai Politik yang menjadi pemenang di Pemilihan beberapa daerah seperti contohnya Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, Kota Solo dan Kabupaten Sidoarjo, beberapa daerah tersebut memiliki dominasi yang begitu kuat dan besar yang berasal dari hanya satu Partai Politik yang menguasai dominasi di lingkungan Kekuasaan Legislatif maupun Eksekutif.

Menurut data website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beberapa daerah diatas hanya didominasi oleh Partai Politik tunggal sebagai pemenangnya, oleh karena itu dari kondisi seperti ini yang membuat dinamisasi Partai Politik menjadi lemah di beberapa daerah tersebut, sehingga proses kedewasaan berdemokrasi belum sepenuhnya tercapai¹. Salah satu partai yang memiliki dominasi dan kekuatan yang besar di Sidoarjo yakni partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo ini berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai partai politik yang memiliki dominasi kuat di dalam kontestasi baik dalam pemilihan umum maupun di pilkada Sidoarjo

Berakhirnya era Orde Baru dan berdirinya Reformasi membuat situasi politik dan ekonomi bangsa Indonesia juga mengalami banyak perubahan yang signifikan. Antara lain yakni perubahan atas kondisi partai politik yang ada di dalam percaturan politik nasional. Antara lain adalah munculnya satu partai dengan dominasi ulama dan kyai yang begitu besar yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PKB resmi didirikan pada tanggal 23 Juli 1998. Dari proses berdirinya Partai yang didominasi oleh banyak ulama dan kyai NU ini terdapat satu fakta yang luar biasa mencengangkan dalam sejarah partai politik yang baru berdiri, hal ini dibuktikan dengan partai tersebut dapat menembus dan menduduki dalam peringkat 3 besar perolehan suara pada pemilu tahun 1999².

Perjalanan yang dilakukan oleh partai yang didominasi oleh kyai dan ulama tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengaruh organisasi induknya yakni Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi besar khususnya di Kabupaten Sidoarjo, pengaruh dari Nahdlatul Ulama tersebut juga bisa dikatakan sebagai faktor pendukung Partai Kebangkitan Bangsa dapat diterima oleh masyarakat di Kabupaten

Sidoarjo dan menjadi partai pemenang baik di kontestasi eksekutif dan legislative, hal ini dibuktikan Pada tahun 2014 menurut database yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo setidaknya tercatat warga Nahdlatul Ulama yang sudah memiliki Kartu Tanda Anggota NU (Kartanu) adalah 220.000 orang, jumlah ini relatif lebih kecil dikarenakan masih banyak lagi mayoritas warga Nahdlatul Ulama yang belum memiliki Kartanu tersebut³.

Tulisan ini akan membahas secara berkelanjutan tentang *Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Sidoarjo tahun 2000-2015*. Relevan dengan apa yang sudah di bahas di alinea sebelumnya bahwasanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga termasuk dalam bagian Partai Politik yang memiliki dominasi yang begitu besar dan kuat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terhitung dalam kurun waktu 15 Tahun yakni bermula dari tahun 2000-2015 dengan dibuktikan 3 kepemimpinan yang dihasilkan dari proses Pemilihan Kepala Daerah selalu berakhir dan dimenangkan oleh kandidat kepala dan wakil kepala daerah oleh parpol yang berlambang Jagat serta Memiliki 9 Bintang dalam logonya tersebut⁴.

Selain Berjaya dalam kekuatan di lingkungan Eksekutif menurut data resmi website Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sidoarjo Partai yang dilahirkan dari pemikiran ulama dan kyai Nahdlatul Ulama tersebut juga meneruskan kekuasaannya di lingkungan legislative atau DPRD Sidoarjo, tercatat dalam kontestasi pada pemilu 2004 sampai 2019, 3 penyelenggaraan kontestasi legislatif di Kabupaten Sidoarjo selalu berakhir dengan pemenang dari Partai Kebangkitan Bangsa yakni pada pemilu tahun 2004, 2014 dan 2019, jumlah perolehan suara yang sangat dinamis, berturut-turut antara lain yakni, pada tahun 2004 mendapatkan suara sebanyak 332.344 suara dan mendapatkan 16 kursi DPRD Sidoarjo, tahun 2009 memperoleh 150.941 suara dan memperoleh 10 kursi DPRD Sidoarjo, tahun 2014 memperoleh 263.630 suara dan memperoleh 13 kursi DPRD Sidoarjo serta pada pemilu tahun 2019 memperoleh 309.249 suara dan mendapatkan 16 kursi DPRD Sidoarjo⁵.

Sebagai partai yang memiliki dominasi yang sangat kuat tentunya selain juga berdampak pada partisipasi politik masyarakat Sidoarjo tentunya akan berdampak kepada kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Partai Kebangkitan Bangsa sendiri di dalam lingkungan Eksekutif maupun legislative, dan tentunya dalam mengusulkan atau memutuskan kebijakan seringkali PKB tidak memiliki partai oposisi yang begitu kuat dikarenakan memang dalam segi

¹ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Rekapitulasi Hasil Pemilihan*, diakses dari <https://www.kpu.go.id/index.php/home>, pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 17.50

² Muhaimimin Iskandar, *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Indonesia* (Yogyakarta: Klik.R, 2007). Hal 2

³ NU Online, *Keunggulan PCNU Sidoarjo Layak Jadi Percontohan*, diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/55285/keunggulan-pcnu-sidoarjo-layak-jadi-percontohan>, pada tanggal 26 Desember 2020, pada pukul 18.33

⁴ Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, *Sejarah Berdirinya Kabupaten Sidoarjo*, diakses dari <http://portal.sidoarjokab.go.id/kabupaten-sidoarjo>, pada tanggal 26 Desember 2020, pada pukul 12.33

⁵ KPU Kabupaten Sidoarjo, *Rekapitulasi Hasil Pemilihan Di Kabupaten Sidoarjo*, diakses dari <https://kpu-dsidoarjokab.go.id/pages/perolehan-suara-hasil-pemilu-kpu-sidoarjo>, pada tanggal 1 Januari 2021, pada pukul 22.00

perolehan kursi di Legislatif sudah menjadi mayoritas PKB sehingga hal ini akan mempengaruhi psikologi partai-partai kecil untuk terpaksa dalam memberikan keputusan yang diusulkan oleh PKB, tentunya kebijakan-kebijakan tersebut tidak memiliki control yang dilakukan oleh partai oposisi sehingga sangat dimungkinkan sekali kebijakan tersebut akan menjadi senjata bunuh diri Partai Kebangkitan Bangsa apabila mereka telah menganggap dominasi yang kuat sehingga akan muncul kesewenang-wenangan dalam menentukan kebijakan. Contoh sederhana dari sebuah dominasi partai politik yang tidak memiliki partai oposisi adalah kasus-kasus korupsi pejabat pemerintahan daerah.

Rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Konstelasi Politik di Kabupaten Sidoarjo Dengan Dominasi Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2000-2015 ? (2) Apa dampak kebijakan Partai Kebangkitan Bangsa dalam sektor Eksekutif dan Legislatif Tahun 2000-2015 ?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bangunan politik di Kabupaten Sidoarjo dan dampak kebijakan dari Partai Kebangkitan Bangsa Sidoarjo dalam lingkungan Eksekutif dan Legislatif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam proses penulisan dan penelitian ini nantinya akan menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam proses melakukan penelitian sejarah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Heuristik adalah proses mencari sumber-sumber sejarah. Dalam pencarian sumber penulis menelusuri arsip atau dokumen lainnya yang relevan dan sejaman dengan topik yang sedang diteliti. Beberapa sumber lainnya ditelusuri diberbagai tempat seperti Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Timur, Perpustakaan Daerah Sidoarjo, perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan DPW PKB Jawa Timur, Perpustakaan DPC PKB Sidoarjo, Museum Nahdlatul Ulama, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Laboratorium Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya, peneliti juga melakukan penelusuran online pada website yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum, website yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, website yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, website yang dimiliki oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan beberapa website yang diperlukan dalam kelengkapan data dan fakta pada tulisan ini

Sumber primer dari proses penelitian pada tulisan ini yakni wawancara dengan beberapa tokoh Partai Kebangkitan Bangsa, Pengurus Nahdlatul Ulama, Badan Otonom Nahdlatul Ulama, Sekretariat DPRD Sidoarjo dan Masyarakat. Sedangkan pada sumber sekunder yakni dokumen-dokumen yang telah disebutkan diatas

Kritik sumber Merupakan sebuah tahapan yang harus ditempuh oleh penulis untuk dapat mengetahui kadar objektifitas dan subjektifitas dari sebuah data dan fakta yang telah ditemukan oleh penulis. Dalam kritik sumber ini digunakan sumber seperti buku, jurnal, tesis, koran, dan foto.

Ada dua jenis kritik yakni kritik intern dan kritik ekstern, kritik ekstern mengarah pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber. Objektifitas mengacu pada materi sezaman. Dalam melakukan kritik ekstern ini penulis menguji beberapa sumber yang telah didapatkannya lalu selanjutnya membuat beberapa perbandingan atau kritik tentang sumber tersebut apakah sudah relevan atau tidak, sumber data atau fakta dari sumber eksternal meliputi wawancara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan fakta sejarah pada tulisan ini. Sedangkan kritik intern yaitu proses pengujian isi atau kandungan sumber. Penggunaan beberapa sumber yang didapatnya diantaranya yang berasal dari perpustakaan Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Timur, Dewan Pengurus Cabang Sidoarjo, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, Museum Nahdlatul Ulama atau perpustakaan daerah Jawa Timur. Sehingga dari kedua proses tersebut akan dipilih sumber yang memiliki kredibilitas yang tinggi untuk pemenuhan fakta pada tulisan ini.

Interpretasi merupakan kegiatan mengumpulkan fakta yang ditemukan kemudian menafsirkan dengan memberikan analisis yang bersifat ilmiah terhadap sebuah peristiwa yang sedang diteliti. Dari fakta yang dapat ditemukan diinterpretasikan atau ditarik kesimpulannya sehingga dapat menjadikan sebuah bukti otentik yang digunakan untuk mengungkap kebenaran dengan cara mencari keterkaitan antara fakta-fakta yang diperoleh dengan melakukan analisis yang membentuk sebuah fakta. Pada penulisan ini akan menggunakan beberapa data dan fakta yang juga terdapat relevansi perkembangan yang telah dialami dan dilewati oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sidoarjo yang sangat berkorelasi dengan tradisi yang ada di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama.

Historiografi merupakan penutup dari seluruh tahapan metode penelitian sejarah setelah peneliti menemukan sumber sejarah dari sumber primer maupun sekunder kemudian dilanjutkan uji sumber dan interpretasi. Dari tahapan ini kemudian dilakukan proses penyusunan karya atau skripsi ini dengan berdasarkan pada kaidah akademik yang memiliki cakupan data yang logis, kronologis dan sistematis, sehingga mampu mempertahankan segi ilmiah dari skripsi ini. Pada tahapan ini secara garis besar bercerita tentang perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai kekuatan politik di Kabupaten Sidoarjo.

A. Lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Pasca lengsernya rezim orde baru milik Presiden Soeharto, Indonesia bisa dikategorikan akan menatap masa depan yang lebih baik dengan lahirnya sebuah rezim reformasi, rezim reformasi merupakan bagian dari perjuangan rakyat Indonesia untuk melakukan kehidupan yang bebas dalam berdemokrasi. Perubahan yang sangat signifikan yang dapat di analisa adalah perubahan dalam bidang politik di negara Indonesia, pasca lahirnya era reformasi ini banyak sekali munculnya semangat baru dalam

hal perbaikan sistem politik yang diakibatkan sistem politik di era orde baru memiliki sistem otoriter, sehingga kondisi perpolitikan pada era reformasi tersebut Indonesia memiliki perubahan dengan menganut sistem multipartai yang tidak terbatas⁶.

Undang-Undang yang mengatur tentang sistem multipartai adalah Undang-Undang No 2 Tahun 1999 yang berbunyi “Perubahan dari Sistem multipartai terbatas menjadi sistem multipartai tidak terbatas, sehingga jumlah partai politik yang tadinya dibatasi hanya 3 yakni PDI, PPP, dan Golkar menjadi tidak terbatas jumlahnya”⁷. Dalam dokumen Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pada tahun 1999 setidaknya terdapat 141 partai politik yang akan mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi pemilu tahun 1999, namun diantara jumlah tersebut hanya sebanyak 48 partai politik yang dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan untuk kontestasi pemilu tahun 1999. Pada tahun 2004 terdapat 50 partai politik yang mendaftarkan diri dan hanya terdapat sebanyak 24 partai politik yang dapat mengikuti perhelatan pemilu pada tahun 2004 tersebut. Sedangkan pada tahun 2009 total terdapat 38 partai politik yang telah mendaftarkan diri pada kontestasi pemilu tahun 2009⁸.

Dari sistem multipartai tidak terbatas tersebut, yang merupakan cikal bakal berdirinya partai politik yang mempunyai kedekatan dan identitas yang melekat sebagai partai politiknya Kyai dan Ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Partai Kebangkitan Bangsa resmi di dirikan pada tanggal 23 Juli 1998 bertempat di Jakarta setelah sesaat bangsa Indonesia keluar dari rezim orde baru dan transisi ke reformasi, dan merupakan salah satu partai yang mampu bersaing secara langsung dengan beberapa partai yang juga didirikan pasca orde baru maupun partai yang telah lama berdiri⁹. Partai Kebangkitan Bangsa tersebut banyak di persepsikan merupakan sebuah sayap politik dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama karena dilihat dari tokoh-tokoh yang menjadi deklaratornya merupakan kyai dan ulama yang menjadi tonggak penting dalam organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Aburrahman Wahid, A. Mustofa Bisri dan A. Muhiith Muzadi¹⁰, sehingga hal ini nantinya akan membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di jajaran nasional maupun di daerah.

Meskipun demikian representasi dari berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa tidak bisa di korelasikan dengan kembalinya Nahdlatul Ulama dalam kancah perpolitikan di Indonesia karena hal ini merujuk pada keputusan muktamar

NU pada tahun 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo yang menyatakan Nahdlatul Ulama telah resmi keluar dari partai politik sehingga kembali ke khittah tahun 1926 sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang Agama, Sosial, Pendidikan, dan Ekonomi¹¹.

Kabupaten Sidoarjo yang secara geografis terletak pada wilayah yang strategis, dengan perbatasan sebelah Selatan langsung berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, sebelah Utara berbatasan secara langsung dengan Kota Surabaya, sebelah Timur langsung dengan hamparan Selat Madura dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah mencapai 634,38 km²¹². Sehingga dari wilayah geografis tersebut menjadikan Kabupaten Sidoarjo menjadi Kabupaten yang banyak di dirikan pusat-pusat industri baik di tingkat micro maupun di tingkat macro. Kabupaten Sidoarjo selain di kenal sebagai kota yang memiliki sejumlah industri besar kabupaten ini juga dikenal karena Kabupaten Sidoarjo juga memiliki tradisi kultural secara agamis dengan didominasi warga Nahdlatul Ulama.

Kabupaten Sidoarjo juga termasuk salah satu kabupaten yang memiliki dominasi besar Nahdlatul Ulama, sehingga dalam konteks politik apa yang menjadi persepsi masyarakat terhadap partai yang diprakarsai oleh kalangan kyai dan ulama Nahdlatul Ulama terwujud nyata di Partai kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo. PKB merupakan salah satu partai politik yang memiliki ideologi islamis di Sidoarjo setelah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo menjadi pendatang dan pesaing utama dari partai-partai yang memiliki ideologi ke-islaman tersebut.

Masyarakat Sidoarjo yang memiliki kultur Nahdiyyin tidak bisa dipisahkan dalam proses perkembangan PKB di Kabupaten Sidoarjo, hal ini dibuktikan dengan ketika partai tersebut di dirikan partai yang memiliki lambang jagat dan bintang Sembilan tersebut sudah bisa bersaing dengan pendahulunya baik dari partai yang telah lama berdiri maupun yang baru didirikan. Sehingga partai PKB dapat langsung meroket dalam pemilihan tahun 2004 dengan hasil yang mengejutkan di perhelatan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Sidoarjo dengan PKB memperoleh kursi sebanyak 16 kursi dan menjadikan PKB mendominasi perolehan kursi DPRD Sidoarjo dan berhasil mengamankan kemenangan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh PKB pada pemilihan tahun 2004 tersebut.

⁶ Juang Abdi M, Skripsi, *Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam Menjaga Elektabilitas Calon Kepala Daerah (Study Pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo*, (Malang: UB, 2017), Hal. 3

⁷ Ibid., hlm. 4

⁸ Lili Romli, *Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian Di Indonesia*, Jurnal Politika, Vol. 2, No. 2, November 2011, Hal. 200

⁹ Muhaimin Iskandar, Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Bangsa, loc. cit

¹⁰ Buku Manifesto PKB Melayani Ibu Pertiwi tentang pengertian dasar dan sejarah singkat Partai Kebangkitan Bangsa oleh Tim Kajian Lanskap Indonesia, Hal. 6

¹¹ M. Eko Subagtio, Skripsi, *Perjalanan Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1973-1984 (Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Partai Persatuan Pembangunan)*, (Surabaya, Unesa, 2019), Hal. 4

¹² Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, *Kondisi Geografis Kabupaten Sidoarjo*, diakses dari <http://portal.sidoarjo.kab.go.id/geografis>, pada tanggal 28 Februari 2021, Pukul 11.16

B. Konstelasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Di Sidoarjo

Masa kejayaan yang telah diraih oleh Partai Kebangkitan Bangsa di kancah politik nasional pada tahun pertama keikutsertaannya menjadi peserta pemilu dengan hasil akhir menduduki peringkat 4 sebagai pemenang pemilu tahun 1999 tentunya sangat berpengaruh di dalam kondisi politik partai di tingkatan provinsi dan juga kabupaten/kota¹³. Hasil yang diraih dari tingkatan nasional tersebut yang menjadi ujung tombak pergulatan kemenangan dalam meraih pola komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa di seluruh tingkatan, hal inilah yang menjadi dasar bagi kondisi politik di Kabupaten Sidoarjo.

Konstelasi partai politik yang telah dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Sidoarjo sangat dinamis dan fleksibel dimana dalam hal ini PKB tidak menutup kemungkinan untuk berkomunikasi secara partai dalam konteks sosial politik dengan partai lainnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sehingga dalam pola komunikasi yang telah dibangun oleh PKB Sidoarjo ini membentuk dan menciptakan psikologi bahwasanya secara garis partai PKB akan membuka komunikasi dengan siapa saja¹⁴. PKB yang berdirinya mendapatkan fasilitas penuh dari Nahdlatul Ulama ini juga mempunyai sikap dan ajaran yang terbuka dengan sesama. Dari ajaran tersebut yang membuat karakter dari Partai kebangkitan Bangsa khususnya di Kabupaten Sidoarjo ini memiliki 2 arah gerak dalam proses pemenuhan strategi politik, yang pertama adalah PKB selalu melakukan proses politik jemput bola terhadap tawaran politik partai lain dan juga melakukan politik jaga gawang terhadap partai lain¹⁵.

Sikap yang telah ditentukan oleh pengurus partai ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa hasil dari Mukhtamar Luar Biasa PKB di Ancol, Jakarta pada tanggal 2-4 Mei 2008 pada Bab III pasal 3 dan 4 tentang asas dan prinsip perjuangan yang berbunyi bahwa Partai berasaskan atas kandungan yang terdapat di sila Pancasila dan Prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepala Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai islam Ahlusunnah Wal Jamaah¹⁶.

Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo juga tidak selamanya berbicara mengenai konteks politik namun ada beberapa visi misi partai yang harus diimplementasikan seperti halnya dalam bidang Pendidikan, Sosial, Keagamaan

dan Ekonomi. Oleh karena itu dalam hal komunikasi menjadi kunci penting bagi kemajuan PKB di Kabupaten Sidoarjo sendiri. Karena ketika partai tidak hanya berbicara mengenai konteks politik maka hal tersebut juga akan mengandeng mitra kerja partai sehingga dalam program politik hal tersebut juga menjadi bagian dari kampanye terhadap partai itu sendiri¹⁷. Pada kondisi dimana beberapa partai besar mengalami degradasi terkait persoalan etika politik yakni politik pragmatis, Partai Kebangkitan Bangsa di Sidoarjo yang berdirinya di nahkodai ulama dan kyai NU ini memiliki arah tujuan yang berbeda, sehingga kehadiran PKB sebagai solusi dari permasalahan dengan memiliki pandangan politik yang tetap mengedepankan nilai-nilai moralitas sehingga etika politik di masa depan tidak tergerus akan sebuah penjajahan moralitas berpolitik¹⁸. Politik pragmatis pada kasus dewasa ini menjadi momok besar bagi sistem perpolitikan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

Kondisi ini diperkuat dalam amanat tujuan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa yakni (1) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, (2) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual, (3) Mewujudkan tatanan politik di nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah¹⁹. Sehingga Partai ini lahir dari sebuah keresahan terhadap menurunnya etika-etika berpolitik yang telah diwariskan oleh partai-partai yang telah lahir di era orde baru.

C. PKB Dan Kultur Nahdlyin Di Sidoarjo

Partai Kebangkitan Bangsa yang secara harfiah merupakan bagian dari hasil transformasi partai Nahdlatul Ulama merupakan sebuah modal penting bagi perkembangan PKB di Sidoarjo. Kembalinya Nahdlatul Ulama dalam konteks perjuangan awal menimbulkan sedikit perguncangan di dalam tubuh Nahdlatul Ulama khususnya, dimana beberapa tokoh penting dan masyarakat yang pada waktu orde baru dapat menyalurkan aspirasinya secara mandiri kepada partai Nahdlatul Ulama pada saat kembali ke khittah 1926 banyak aspirasi-aspirasi penting warga Nahdlyin yang tidak bisa diakomodir, Meskipun sebelum kembali ke khittah Nahdlatul Ulama melakukan fusi dengan beberapa partai seperti Partai Muslim Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti sehingga membentuk secara resmi partai politik yakni Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 30 Dzulqodah

¹³ Modul I Untuk Pemilih Pemula pada BAB V tentang Hasil Pemilu Nasional Mulai Tahun 1955-2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hal 41

¹⁴ Wawancara dengan bapak Arly Fauzi selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Desa Sepande, tanggal 4 Maret 2021, bertempat di Ponpes Nurul Ikhlas Sidoarjo, pukul 10.40 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Khalim selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Kelurahan Sidokare, tanggal 9 Maret 2021,

bertempat di Kantor DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, pukul 09.00 WIB

¹⁶ AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Mukhtamar Luar Biasa di Ancol, Jakarta Tanggal 2-4 Mei 2008, hlm. 13

¹⁷ Tim Kajian Lanskap Indonesia, op. cit. hlm 13

¹⁸ Hanif Dhakhiri dan Massa Djafar, *Struktur Politik Partai Kebangkitan Bangsa*, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 11, No. 01, 2015, Hal. 1602

¹⁹ Ibid., Hal. 1605

1392 atau 5 Januari 1973²⁰. Sehingga pada pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 peserta secara kumulatif yakni Partai Golongan Karya, partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Perjuangan, kondisi ini merupakan sebuah maklumat yang tercantum dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1973 tentang Undang-Undang Parpol dan Golkar²¹.

Setelah mengalami permasalahan secara internal di tubuh PPP akhirnya secara resmi dan bulat Nahdlatul Ulama kembali ke Khittah yang ditandai Mukhtamar NU ke 27 di Situbondo. Dengan demikian tugas dan peran Nahdlatul Ulama yakni, tidak ada hubungannya Nahdlatul Ulama dengan partai apapun pada masa itu dan menjadikan Pancasila sebagai founding utama atas terlaksananya tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama tersebut²². Dari permasalahan tersebut yang menjadikan modal utama kepercayaan warga Sidoarjo terhadap berdirinya Partai kebangkitan Bangsa yang dianggap merupakan representative dari hasil transformasi yang telah dilakukan oleh Partai NU. Kehadiran PKB di tengah-tengah kondisi tantangan zaman secara hakikat tidaklah mudah karena memang di Kabupaten Sidoarjo sendiri telah muncul partai-partai yang lebih dahulu mengikuti Pemilu.

Garis kultural masyarakat Sidoarjo yang lebih didominasi oleh lingkungan warga Nahdlatul Ulama yang menjadikan proses perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di Sidoarjo cukup pesat dan cepat²³. Adanya pondok pesantren tertua yang ada di Jawa Timur tepatnya di Desa Siwalan Panji Buduran Sidoarjo menjadi bukti nyata bagaimana warga Sidoarjo memiliki garis kultural kental dengan Nahdlatul Ulama, tercatat dalam sejarah pondok *Al-Hamdaniyah* tersebut terdapat beberapa alumni yang menjadi tonggak penting bagi Nahdlatul Ulama saat ini khususnya di Kabupaten Sidoarjo seperti KH. M. Hasyim Asy'ari, KH. Asy'ad Samsul Arifin, KH. Ridwan Abdullah, KH. Alwi Abdul Aziz, KH. Wachid Hasyim, KH. Cholil, KH. Nasir, KH. Wahab Hasbullah, KH. Umar, KH. Usman Al Ishaqi, KH. Abdul Majid, KH. Dimiyati²⁴. Hal ini diakibatkan oleh Masyarakat Sidoarjo masih menggunakan kacamata berpolitik agamis dimana ketika ada partai politik yang memiliki nafas keagamaan dan memiliki kultur yang sama maka hal itu akan mempercepat perhatian kepada partai tersebut²⁵.

Dalam penentuan aspek politik masyarakat di Kabupaten Sidoarjo masih dalam pengaruh politik *Dawuh e Kyai*, seluruh aspek yang berhubungan dengan politik maka warga di Sidoarjo ini selalu mengedepankan nilai-nilai agama terlebih

dahulu, dari pada nilai-nilai lainnya, sehingga secara pilihan di Kabupaten Sidoarjo, partai mana yang memiliki cerminan dari kumpulan kyai-kyai dan ulama maka partai itulah yang menjadi suri tauladan bagi kancah politik di Sidoarjo.

Salah satu pendiri sekaligus deklarator dari PKB yakni KH. Abdurrahman Wahid atau sering di sapa dengan Gus Dur, yang merupakan cucu KH. Hasyim Asy'ari yang menjadi tokoh Pendiri Nahdlatul Ulama, menjadi salah satu faktor penting dari perkembangan PKB di Kabupaten Sidoarjo. Kekuatan kharismatik yang telah ditunjukkan oleh Gus Dur membuat partai yang merupakan sayap dari Nahdlatul Ulama ini mendapatkan perhatian istimewa dari masyarakat Sidoarjo, karena dianggap sebagai figure penting dari perjalanan yang telah dialami oleh Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo²⁶. Ketegasan yang dimiliki oleh sosok figure Gus Dur ini yang membuat posisinya sangat disegani oleh seluruh kader-kader PKB, hal ini terbukti pada saat PKB mengalami konflik internal pada tahun 2004, dengan sangat tegasnya sebagai deklarator PKB, Gus Dur pada saat itu memecat dan mengeluarkan beberapa kader seperti Matori Abdul Jalil, Alwi Shihab, dan Syaifullah Yusuf dari posisi strategis PKB karena dianggap tidak loyal pada PKB²⁷. Konflik internal yang terjadi pada PKB tersebut sangat berdampak pada perolehan suara PKB pada pemilu tahun 2004 dan 2009, baik di tingkat pusat dan daerah mengalami penurunan, namun penurunan tersebut dapat segera diantisipasi pada pemilu berikutnya yakni pada pemilu tahun 2014 dimana suara PKB kembali mengalami kenaikan perolehan suara pemilu tahun 2004 dan 2009 lalu, hal ini dikarenakan sudah mulai tumbuhnya lagi kepercayaan warga Nahdlatul Ulama bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang berhasil keluar dari konflik internal partai²⁸, khususnya pada perolehan suara di Kabupaten Sidoarjo.

Dari adanya pondok pesantren tertua di Jawa timur yakni *Al Hamdaniyah* dan terdapat figure penting Nahdlatul Ulama dijadikan sebagai faktor pendukung PKB di Sidoarjo ini dapat diterima secara cepat oleh masyarakat Sidoarjo yang didominasi oleh warga Nahdlynnnya. Sehingga dari kondisi demikian PKB mampu lebih cepat beradaptasi dengan konstelasi politik di Kabupaten Sidoarjo yang seluruh keputusan politiknya di tentukan oleh Organisasi Nahdlatul Ulama Sidoarjo.

²⁰ M. Subhan, Dkk, *NU Sidoarjo* (Sidoarjo: Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama Sidoarjo, 2020), Hal. 29

²¹ Ibid., hlm. 29-30

²² Ibid., hlm. 36

²³ Wawancara dengan bapak Maimun Siradj selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Desa Kedung Cangkring, tanggal 10 Maret 2021, bertempat di kediaman Bapak Maimun Siradj, Jabon, pukul 11.00 WIB

²⁴ NU Online, *Pesantren Al Hamdaniyah, Tertua di Jawa Timur dan Lahirkan Ulama-Ulama Besar*, diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/63846/pesantren-al-hamdaniyah->

[tertua-di-jawa-timur-dan-lahirkan-ulama-ula-besar](#). Pada tanggal 16 Maret 2021, Pukul 21.38 WIB

²⁵ Yussuf Kalla dkk, *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7

²⁶ M. Ridoi, Skripsi, *Kekuatan Figur Dalam Partai Politik (Studi Terhadap Abdurrahman Wahid Di Partai Kebangkitan Bangsa)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), Hal. 2

²⁷ Ibid., hlm. 4

²⁸ Amril Buamona, Zaini Rahman, Badrul Munir dkk, *Peta Jalan Kemenangan PKB Tahun 2019* (Jakarta: Lembaga Pemenangan Pemilu) Hal.3

D. Hubungan PKB Sidoarjo Dan Nahdlatul Ulama Sidoarjo

Hubungan luar biasa yang terjadi antara Partai Kebangkitan Bangsa dan Nahdlatul Ulama tidak bisa di pisahkan jika kita melihat perjalanan panjang berdirinya partai ini, yang diawali ketika proses dinamika di Nahdlatul Ulama setelah menyatakan keluar dari partai politik. Hal ini yang kemudian menjadi dasar kuat kemudian di musyawarakan oleh kyai-kyai Nahdlatul Ulama tentang diperlukannya sebuah sayap politik untuk menampung aspirasi dari masyarakat luas dan warga Nahdliyin khususnya sehingga lahirlah PKB sebagai representative sayap politik NU²⁹. Tindakan yang telah di cerminkan oleh kyai-kyai NU tersebut dapat di kategorikan bahwa klasifikasi julukan “ kyai “ bukan seorang yang hanya berbicara mengenai konteks keagamaan, namun juga berperan penting dalam konteks sosial-politik bagi masyarakat luas³⁰. Sehingga pemahaman mengenai kepemimpinan yang dilakukan ulama dan kyai tersebut diyakini mempunyai sebuah otoritas penuh³¹. Namun menurut Abdurrahman Wahid seorang kyai tersebut harus menguasai konsep ilmu Agama Islam dan memiliki pesantren dengan beserta santrinya sehingga dalam penunjukan kyai ini tidak bisa dengan bebasnya diberikan kepada orang lain³². Pemikiran dan karakter yang dijalankan oleh Partai Kebangkitan Bangsa merupakan bentuk intergrasi kyai dan ulama yang berasal dari pesantren yang menggunakan konteks sosial-keagamaan didalam tubuh PKB³³. Sehingga apa yang menjadi dasar bagi PKB merupakan rumusan yang telah dibangun dan disepakati oleh kyai dan ulama yang berasal dari Nahdlatul Ulama sehingga diantara PKB dan Nahdlatul Ulama tidak memiliki persimpangan yang justru menjadikan sebuah permasalahan internal di dalamnya.

Pola komunikasi yang dijalankan oleh PKB di Sidoarjo juga sangat relevan dari apa yang telah dilakukan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB yang telah menjalin pola komunikasi yang luar biasa intensif dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sehingga komunikasi ini juga terjalin di seluruh tingkatan baik di pihak NU dan PKB sendiri. Pola komunikasi ini yang menjadi salah satu faktor penting bagi proses perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo sehingga menjadi salah satu partai besar di Sidoarjo.

Sinergitas Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di

Sidoarjo dan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa di Sidoarjo pada masa awal berdirinya PKB merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dielakkan karena pada masa awal berdirinya PKB, didalamnya, juga terdapat sumbangsih pengurus NU Sidoarjo yang menjadi punggawa dari kokohnya PKB di Sidoarjo³⁴. Hal ini dikarenakan pada saat awal berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo pada saat itu kekuatan sumber daya manusianya masih dipercayakan kepada Nahdlatul Ulama sehingga dalam tatanan secara struktural pengurus PKB di Sidoarjo juga merupakan pengurus di NU Sidoarjo³⁵, yang dimulai dari struktur pusat hingga pada struktur paling kecil yakni di tingkat Desa/Kelurahan seluruh pengurus PKB berasal dari Nahdlatul Ulama. Berikut pengurus yang memiliki jabatan struktural di kepengurusan PKB Sidoarjo dan Nahdlatul Ulama Sidoarjo Tahun 2001-2007, menurut SK PAW PCNU Sidoarjo No. 213.a/A.II.04.d/07/2003³⁶, dan lampiran pada Lembar Pertanggungjawaban periode 2002-2007³⁷:

Tabel 1. Daftar Nama Rangkap Jabatan Dalam Kepengurusan PKB dan NU di Sidoarjo Tahun 2002-2007

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	
		NU SIDOARJO	PKB SIDOARJO
1	KH. Badrus Soleh	Wakil Rais	Ketua Dewan Syura
2	KH. Utsman Bahri	Wakil Rais	Anggota Dewan Syura
3	KH. Dhofir Dahrani	A'wan	Anggota Dewan Syura
4	KH. Imron Rofi'i	A'wan	Sekretaris Dewan Syura
5	Drs. H. Abd. mujib Hasyim	Ketua Lembaga LKKNU	Wakil Sekretaris Dewan Syura
6	H. Abd Rochim	Ketua Lembaga Lesbumi	Anggota Dewan Syura

Secara keseluruhan pengurus yang masuk dalam jajaran PKB Sidoarjo memiliki haluan Ahlussunnah Wal Jamaah Nahdlatul Ulama dikarenakan kepengurusan ini merupakan

²⁹ Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi (Internasionalisasi Politik Ulama dan Politik Bervisi Kepentingan Nasional)* (Yogyakarta: KLIK.R, 2006), Hal. 104

³⁰ Wasisto Raharjo Jati, *Ulama dan Pesantren Dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdlatul Ulama*, Jurnal Studi Islam, September 2013, Hal. 1

³¹ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: PT. Duta Aksara Mulia, 2010), hlm. 186

³² Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren* (Jakarta: Darma Bhakti, 1984) hlm. 10

³³ Muhaimin Iskandar, loc. cit

³⁴ Wawancara dengan bapak Maimun Siradj selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Desa Kedung Cangkring, tanggal 10 Maret 2021, bertempat di kediaman Bapak Maimun Siradj, Jabon, pukul 11.00 WIB

³⁵ Wawancara dengan bapak Arly Fauzi selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Desa Sepande, tanggal 4 Maret 2021, bertempat di Ponpes Nurul Ikhlas Sidoarjo, pukul 10.40 WIB

³⁶ M. Subhan, Dkk. op. cit. hlm 108

³⁷ Arsip Kesekretariatan DPC PKB Kabupaten Sidoarjo Tentang Lampiran Susunan Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007

orang-orang pilihan di lingkungan NU Sidoarjo, dalam catatan kepengurusan tidak adanya pengurus yang memiliki agama non muslim dikarenakan kepengurusan PKB Sidoarjo ini sebelum menjalankan amanahnya akan melakukan baiat atau sumpah janji atas nama Al-Qur'an. Sinergitas yang dibangun dalam tubuh internal Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo ini sudah bisa di kategorikan dalam ranah sebuah gerakan kemajuan terhadap kepentingan-kepentingan *Umat/Jamiyah*. Dalam konteks tersebut komunikasi yang telah digaungkan oleh PKB di Sidoarjo dan NU Sidoarjo juga terjalin di ranah politik praktis, dalam hal ini adalah keterkaitan dengan perumusan keikutsertaan PKB Sidoarjo dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo.

Geopolitik di Kabupaten Sidoarjo masih sangat kental ditentukan dari seberapa kuat pengaruh yang diberikan oleh ulama dan kyai sepuh Nahdlatul Ulama yang berasal dari Kabupaten Sidoarjo. Hal ini yang menjadi strategi utama dari PKB di Sidoarjo untuk turut serta melakukan sebuah bentuk konsultasi dan konsolidasi di dalam tubuh Nahdlatul Ulama, proses konsultasi dan konsolidasi tersebut dalam penentuan kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Sidoarjo dan pemilihan anggota DPRD Sidoarjo. Sebab itu seluruh keputusan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat PKB di Jakarta selalu memiliki pertimbangan yang luar biasa yang diberangkatkan dari sinergitas yang terjalin dengan Nahdlatul Ulama di Sidoarjo³⁸.

Dari pola komunikasi yang intensif demikian yang menjadikan kedekatan antara PKB dan NU di Sidoarjo mendapatkan perhatian lebih dari Partai Politik lainnya yang memiliki harapan dapat juga menjadi bagian dari lingkungan Nahdlatul Ulama Sidoarjo dengan memiliki tujuan pokok dapat mengamankan posisi dalam proses pemilihan di wilayah Kabupaten Sidoarjo³⁹. Banyak sekali partai politik yang telah melakukan pendekatan secara kepartaian dan pribadi dengan pengurus PKB Sidoarjo untuk dapat melakukan sebuah bentuk koalisi dalam pemilu dan pilkada di Sidoarjo, namun PKB Sidoarjo selalu mempunyai kalkulasi dalam menentukan sebuah proses konsolidasi partai politik sehingga tidak langsung sepihak dalam proses penentuan apakah sepakat untuk melakukan koalisi atau kemungkinan lainnya yang itu juga dalam koridor Ad-art PKB sehingga keputusan yang dihasilkan murni dari keputusan PKB Sidoarjo secara lembaga partai politik⁴⁰.

E. Perolehan Suara PKB Sidoarjo Pada Pemilu Tahun 2004-2015

Sinergitas yang telah terbangun oleh NU dan PKB

Sidoarjo yang telah diawali ketika berdirinya partai ini merupakan salah satu kunci utama kesuksesan dan strategi PKB di kancah politik Nasional terutama di politik daerah. Daerah yang menjadi kekuatan Nahdlatul Ulama yang menjadi kekuatan penuh dari PKB meliputi wilayah seperti Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo salah satunya⁴¹. Beberapa daerah yang menjadi mayoritas warga Nahdlyin tersebut sangat berpengaruh pada eksistensi Partai kebangkitan Bangsa sebagai peserta pemilu baru, yakni sebagai partai yang lahir produk dari reformasi. Secara otomatis ketika mengklasifikasikan suara PKB kita tidak bisa melepaskan suara yang berasal dari Jamaah Nahdlatul Ulama yang tersebar di beberapa daerah mayoritas dan minoritas kekuatan dari kekuasaan PKB⁴².

kekuatan dari Nadlatul Ulama khususnya di daerah kekuatan PKB belum sepenuhnya melakukan deklasi dukungan ke PKB, menurut data Survei Syaiful Mujani Research Center (SMRC) pada tahun 2015 mengungkapkan hasil penelitian terhadap data pemilu tahun 2014, PKB secara nasional hanya mampu memperoleh suara 9,2 persen dari prosentase warga Nahdlatul Ulama sebesar 49,2 persen, sedangkan di pulau Jawa dengan mayoritas penduduknya Nahdlatul Ulama dengan prosentase 58 persen, PKB hanya mampu memperoleh 11 persen dari jumlah pemilih warga Nahdlatul Ulama sehingga dari data tersebut masih termasuk kategori perolehan suara yang diperoleh oleh PKB di kancah politik nasional masih sangat jauh dengan Partai PDIP, Golkar, Demokrat dan Gerindra⁴³.

Tabel 2. Data Survei Syaiful Mujani Research Center (SMRS) Tahun 2015



³⁸ Wawancara dengan bapak Maimun Siradj selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Desa Kedung Cangkring, tanggal 10 Maret 2021, bertempat di kediaman Bapak Maimun Siradj, Jabon, pukul 11.00 WIB

³⁹ Wawancara dengan Bapak Khalim selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Kelurahan Sidokare, tanggal 9 Maret 2021, bertempat di Kantor DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, pukul 09.00 WIB

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Maimun Siradj selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Desa Kedung Cangkring, tanggal 10 Maret 2021, bertempat di kediaman Bapak Maimun Siradj, Jabon, pukul 11.00 WIB

⁴¹ Hanif Dhakhiri dan Massa Djafar, loc. cit

⁴² Amril Buamona, Zaini Rahman, Badrul Munir dkk, op. cit. hlm 5

⁴³ Ibid., hlm 4

Dari data perolehan suara secara nasional tersebut menjadi sebuah evaluasi bagi struktur PKB dibawahnya yakni di tingkat provinsi dan kabupaten/kota khususnya di Dewan Pengurus Cabang PKB Sidoarjo sendiri sehingga perolehan suara NU dapat dikategorikan sebagai suara mutlak bagi PKB sendiri. Di Kabupaten Sidoarjo mempunyai kultural Nahdlatul Ulama yang sangat kuat, namun tidak semua warga Nahdlatul Ulama menyerahkan dukungan kepada PKB di Sidoarjo. Hasil dari analisa grafik tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab turunya suara PKB di tingkat Nasional dikarenakan adanya konflik internal yang dialami oleh PKB. beberapa faktor yang menjadi kendala mengapa suara NU di Sidoarjo tidak bisa diakomodasi sebagai suara mutlak sebagai lumbung suara PKB di Sidoarjo. Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah faktor kedekatan secara ideology dan kultur keagamaan antara PKB dan NU Sidoarjo, rasionalitas politik serta citra PKB sendiri sehingga dari hal tersebut tidak bisa diklasifikasikan bahwa pemilih islam tidak selamanya dapat menyerahkan dukungan kepada partai yang bernaifaskan islam khususnya di Kabupaten Sidoarjo⁴⁴.

Beberapa kendala dalam hal komunikasi dengan partai lainnya juga mengakibatkan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mengikuti pilkada Sidoarjo sebanyak 3 kali yakni pada tahun 2005,2010 dan 2015 akhirnya dengan kekuatan independensi partai bisa mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa harus melakukan koalisi dengan partai apapun, namun tetap ada beberapa partai politik pendukung yang senantiasa mendampingi PKB Sidoarjo⁴⁵. Keputusan yang diambil oleh PKB Sidorjo ini bukan hanya dirumuskan oleh internal dari PKB sendiri, namun hal itu juga dirumuskan dengan beberapa kyai dan ulama Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sidoarjo, sehingga apabila kyai dan ulama NU memberikan fatwa bahwasanya PKB harus berdiri dan bisa mengusung calonnya tanpa koalisi maka keputusan tersebut yang akan diambil dan dijalankan oleh PKB di Sidoarjo⁴⁶. Hal tersebut kembali lagi karena PKB adalah sayap dakwah bidang politik NU maka keputusan-keputusan yang dihasilkan dari fatwa kyai dan ulama NU akan dijadikan perhitungan yang sangat serius, karena kyai dianggap mempunyai kemampuan untuk menangkap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang melalui keshalihan ilmunya⁴⁷.

Berikut akan disajikan sebuah tabel tentang perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo sebagai pemenang Pemilu pada yang secara independen dapat melakukan pencalonan dan mengusung calonnya

tanpa melakukan sebuah koalisi dan bisa memenangkan pada perhelatan tahun 2005-2015 sehingga menjadi partai politik tunggal yang dapat mencalonkan secara independent tanpa partai lain⁴⁸:

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pilkada Sidoarjo Tahun 2005

N O	NAMA PASANGAN	PARTAI PENGUSUNG	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. H. Win Hendarso, M.Si dan H. Saiful Illah, S.H	Partai Kebangkitan Bangsa	459.206
2	Ir. H. Sjamsu Bahari, BRE dan Hj. Fatimah Toha Assegaf	1.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2.Partai Golongan Karya	61.778
3	Drs. Ec. H. A. Nadhim Amir, M.M dan Drs. Ec. H. Salam	1.Partai Demokrat 2.Partai Persatuan Pembangunan 3.Partai Bulan Bintang 4.Partai Nasional Banteng Kemerdekaan 5.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 6.Partai Karya Peduli Bangsa	155.747

⁴⁴ Amril Buamona, Zaini Rahman, Badrul Munir dkk, loc. cit

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Arly Fauzi selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Desa Sepande, tanggal 4 Maret 2021, bertempat di Ponpes Nurul Ikhlas Sidoarjo, pukul 10.40 WIB

⁴⁶ Imam Nahravi, op. cit. hlm 21

⁴⁷ Deliar Noer, *Gerakan Modern islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 19

⁴⁸ KPU Kabupaten Sidoarjo, *Rekapitulasi Hasil Pemilihan Di Kabupaten Sidoarjo*, diakses dari <https://kpu-d-sidoarjo.go.id/pages/perolehan-suara-hasil-pemilu-kpu-sidoarjo>, pada tanggal 9 April 2021, pada pukul 19.35

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pilkada Sidoarjo Tahun 2010

N O		PARTAI PENGUSU NG	PEROLEHAN SUARA
1	Yuniwati Teryana dan H. Sarto	Partai Demokrat	54.593
2	Dr. Hj. Emy Susanti, MA dan H. Muh. Khulam Junaidi, SP.	1.Partai Amanat Nasional 2.Partai Gerakan Indonesia Raya 3.16 Partai Non Parlemen	82.918
3	H. Agung Subaly, ST dan Drs. H. Samsul Wahid, MM	Perseorangan	24.247
4	H. Saiful Illah, S.H.,M.Hum dan H. M.G. Hadi Sutjipto, S.H.,MM	Partai Kebangkitan Bangsa	450.586
5	Bambang Prasetyo Widodo dan Khoirul Huda, S.Ag.,M.Ag	1.Partai Kebangkitan Nasional Ulama 2.Partai Hati Nurani Rakyat 3.Partai Golongan Karya 4.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	132.977

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pilkada Sidoarjo Tahun 2015

N O	NAMA PASANGAN	PARTAI PENGUSU NG	PEROLEHAN SUARA
1	H. M.G. Hadi	1.Partai	192.414

	Sutjipto, S.H.,MM dan H. Abdul Kholik, S.E	Demokrasi Indonesia Perjuangan 2.Partai Nasdem 3.Partai Demokrat 4.Partai Bulan Bintang	
2	H. Utsman Ikhsan dan Ida Astuti, S.H	1.Partai gerakan Indonesia Raya 2.Partai Keadilan Sejahtera	64.375
3	H. Saiful Illah, S.H.,M.Hum dan H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H	Partai Kebangkitan Bangsa	424.611
4	Warid Andono, S.T dan H. Imam Sugiri, S.T.,MM	1.Partai Amanat Nasional 2.Partai Golongan Karya(Munas Ancol) 3.Partai Golongan Karya (Munas Bali	38.664

PKB Sidoarjo tidak hanya menguasai kontestasi di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, namun kejayaannya juga terjangkau dalam kontestasi pemilihan legislative anggota DPRD Sidoarjo. Dari perhelatan pemilihan legislatif sejak 2004-2014 PKB Sidoarjo mampu untuk mengamankan status kemenangan sebagai penguasa tahta kepemimpinan legislative di Kabupaten Sidoarjo, dengan memperoleh kursi mayoritas di dalam gedung dewan DPRD Sidoarjo⁴⁹. Berikut adalah perolehan hasil kursi Partai Kebangkitan Bangsa pada Pileg Tahun 2004-2014⁵⁰:

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Maimun Siradj selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Desa Kedung Cangkring, tanggal 10 Maret 2021, bertempat di kediaman Bapak Maimun Siradj, Jabon, pukul 11.00 WIB

⁵⁰ KPU Kabupaten Sidoarjo, *Rekapitulasi Hasil Pemilihan Di Kabupaten Sidoarjo*, diakses dari <https://kpu-sidoarjo.kab.go.id/pages/perolehan-suara-hasil-pemilu-kpu-sidoarjo>, pada tanggal 9 April 2021, pada pukul 19.35

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Perolehan kursi Partai Kebangkitan Bangsa pada Pileg 2004-2014

NO	PIL EG	SUARA DAERAH PEMILIHAN (DAPIL SIDOARJO)						TOTAL KURSI
		1	2	3	4	5	6	
1	200 4	43.166	62.883	49.309	52.119	63.427	61.445	16
2	200 9	11.724	31.672	44.802	25.014	17.270	20.459	10
3	201 4	60.208	52.757	33.197	50.649	38.449	28.370	13

Suara yang diperoleh oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo masih terbilang fluktuatif karena masih terdapat beberapa penurunan dan kenaikan. Hal ini tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor yang sudah dijelaskan di atas, dan tentunya terutama pada faktor keberpihakan tubuh Nahdlatul Ulama Sidoarjo pada Partai Kebangkitan Bangsa, karena memang peta persebaran suara yang dimiliki oleh Partai kebangkitan Bangsa Di Sidoarjo sangat bergantung pada pola hubungan antara PKB dan NU di Kabupaten Sidoarjo⁵¹. Dari kasus demikian merupakan sebuah cakupan yang sempurna jika PKB merupakan aktifitas sebagian warga NU dan NU sendiri merupakan ormas yang tidak hanya berbicara mengenai politik namun lebih luas dari konteks tersebut⁵². Dari data perolehan suara diatas menempatkan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu kekuatan politik di Kabupaten Sidoarjo sehingga seluruh dominasi kehidupan politik sangat ditentukan oleh PKB di Sidoarjo dan Nahdlatul Ulama di Sidoarjo.

F. Strategi Pemenangan PKB Di Sidoarjo

Strategi politik yang sangat mengikuti perkembangan zaman dan visioner dari PKB Sidoarjo ini yang menjadikan kekuatan utama dari proses perkembangan PKB Sidoarjo

menjadi partai besar di Sidoarjo⁵³. Selain melakukan pendekatan khusus dengan Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, PKB Sidoarjo juga sangat membutuhkan strategi internal yang jitu dan strategis, sehingga dapat menarik simpati masyarakat terhadap partai yang berciri khaskan ulama dan kyai NU tersebut untuk dapat memperoleh mayoritas suara masyarakat Sidoarjo⁵⁴. Strategi yang dilakukan tersebut merupakan hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh seluruh struktural PKB Sidoarjo yang dimulai dari tingkatan Ranting hingga pada tingkatan Pengurus Cabang Sidoarjo⁵⁵. Sehingga hasil tersebut dapat disepakati oleh seluruh jajaran PKB di Sidoarjo sendiri yang digunakan sebagai penyamaan persepsi dan pandangan untuk dapat memenangkan PKB Sidoarjo. Salah satu bentuk strategi yang menjadi dasar dari penerapan keseluruhan strategi yang sudah direncanakan oleh PKB Sidoarjo adalah penyiapan dan penguasaan media, dimana di PKB Sidoarjo ini dalam catatan sejarah juga termasuk dalam wilayah yang menjadi penjaga kestabilan elektabilitas PKB di tingkatan nasional. Oleh karena itu dalam penyiapan media ini PKB Sidoarjo serius dalam bidang tersebut, karena media dianggap sebagai pintu utama masuknya informasi untuk pemaparan profil yang dimiliki oleh sebuah partai politik terutama PKB Sidoarjo sehingga dapat mempengaruhi opini dan kerangka pemikiran daripada masyarakat Sidoarjo⁵⁶.

Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo sendiri sangat memperhitungkan kalkulasi keuntungan apabila menggunakan media cetak dan massa sebagai bahan komunikasi dengan masyarakat sidarjo⁵⁷. Sehingga semua jenis media di Kabupaten Sidoarjo tidak bisa terlepas pada pemberitaan dari unsur partai politik tersebut. PKB di Sidoarjo sangat mempercayai ketika akses media cetak dan massa sudah bisa digunakan sebagai media kampanye maka strategi-strategi berikutnya dapat dengan mudah direalisasikan. Media sangat berperan penting bagi perkembangan PKB di Sidoarjo untuk dapat menjaga elektabilitas partai penguasa di Kabupaten Sidoarjo ini. Berikut beberapa strategi yang dilakukan oleh PKB Sidoarjo :

a. Komunikasi Partai Politik

Komunikasi politik tentunya sangat penting sekali dilakukan oleh seluruh partai politik yang akan mengikuti kontestasi pemilihan, baik pemilihan legislative maupun pemilihan esekutif. Hal ini juga yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Sidoarjo⁵⁸, sebagai salah satu strategi pemenangan. PKB akan selalu membuka komunikasi

⁵¹ Amril Buamona, Zaini Rahman, Badrul Munir dkk, op. cit. hlm 8

⁵² Khairussalim dkk, *Tujuh Mesin Pendulang Suara* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm 208-209

⁵³ Juang Abdi Muhammad, op. cit. hlm 6

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Arly Fauzi selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Desa Sepande, tanggal 4 Maret 2021, bertempat di Ponpes Nurul Ikhlas Sidoarjo, pukul 10.40 WIB

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Khalim selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Kelurahan Sidokare, tanggal 9 Maret 2021, bertempat di Kantor DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, pukul 09.00 WIB

⁵⁶ Juang Abdi Muhammad, loc. cit.

⁵⁷ Ibid., hlm. 7

⁵⁸ Juang Abdi Muhammad, op. cit. hlm 19

politik dengan partai manapun apabila mempunyai visi dan misi perubahan yang sama dan tidak melanggar mengenai tujuan dan fungsi yang ditetapkan oleh PKB yang termaktub dalam AD/ART PKB⁵⁹, dan tentunya visi misi yang juga dijalankan oleh NU di Sidoarjo karena PKB Sidoarjo selalu menawarkan pandangan-pandangan politiknya untuk mengedepankan kemajuan Sidoarjo terlebih dahulu daripada membicarakan mengenai kekuasaan praktis⁶⁰.

Komunikasi politik tersebut juga untuk senantiasa mengedepankan dan menjaga struktur wilayah yang menjadi basis partai. Wilayah tersebut yang memiliki basis warga NU yang masih sangat kuat yang meliputi kecamatan Waru, Taman, Jabon dan Candi, sehingga dari beberapa wilayah tersebut harus segera dilakukan sebuah komunikasi politik untuk dapat menjaga basis suara NU dan PKB Sidoarjo sendiri⁶¹.

b. Komunikasi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

PKB Sidoarjo senantiasa melakukan pendekatan dengan struktur sosial kepada tokoh-tokoh Agama dan tokoh-tokoh Masyarakat, karena pada wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri kedua elemen masyarakat ini memiliki kelebihan masing-masing, dimana tokoh Agama selalu berhubungan dengan pesantren dan lembaga pendidikan berbasis islam dan tokoh masyarakat mempunyai pengaruh lebih kuat bagi masyarakat di lingkungannya.

PKB di Kabupaten Sidoarjo tidak bisa melepaskan pandangannya kepada pondok pesantren karena, antara PKB, NU dan Pondok Pesantren memiliki keterkaitan sejarah yang panjang karena telah menelurkan generasi-generasi hebat yang membawa perubahan dan kemajuan bagi umat⁶². Kedekatan yang dibangun oleh PKB Sidoarjo dengan pondok pesantren sangat mampu mendongkrak perolehan suara PKB dalam seluruh hajatan PKB di Sidoarjo. Tentu dalam hal mutualisme ini ada pengaruh yang nanti akan diberikan oleh PKB terhadap kemajuan pondok pesantren tersebut, pengaruh tersebut bisa diimplikasikan dalam hal kebijakan yang nantinya dibuat oleh PKB yang senantiasa menyerap aspirasi dari kalangan pondok pesantren di Kabupaten Sidoarjo⁶³.

Kedekatan dengan tokoh Masyarakat juga selalu digencarkan oleh PKB Sidoarjo sebagai salah satu bentuk

strategi kemenangan PKB. Struktur terkecil dari masyarakat yakni di lingkungan RT atau RW menjadi bumbu kemenangan bagi PKB di Sidoarjo⁶⁴. Struktur tersebut mempunyai andil besar bagi proses mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya, karena struktur RT dan RW langsung melakukan sosialisasi partai secara langsung namun dengan balutan strategi politik individu. Oleh karena itu ketika melakukan proses konsolidasi tim pemenangan PKB, PKB Sidoarjo tidak pernah meninggalkan untuk membentuk tim pemenangan di wilayah terkecil tersebut. Karena PKB mampu mengimplikasikan ekspektasi-ekspektasi dari struktur masyarakat terkecil melalui penawaran program kerja yang disampaikan sehingga tidak sampai menimbulkan kesan terkucilkan dari kehidupan politik yang akan mempengaruhi pilihan berdemokrasi masyarakat tersebut⁶⁵.

c. Jaring Aspirasi

Tidak berbeda jauh dengan kegiatan pada umumnya sebelum mendekati pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, PKB Sidoarjo juga sangat intensif melakukan pendekatan secara massif dengan masyarakat, disamping dengan berbagai media massa dan cetak. PKB sudah sangat berkomitmen penuh dengan apa yang sudah mereka lakukan pada sebelum terpilihnya anggota maupun partai sebagai pemenang pemilu, sehingga segala janji politik atau aspirasi masyarakat Sidoarjo akan selalu mengalami pembahasan yang serius di lingkungan eksekutif dan legislative di bawah kepemimpinan PKB Sidoarjo, hal ini tentunya dalam pemenuhan citra elektabilitas PKB Sidoarjo⁶⁶.

d. Organisasi Sayap NU dan PKB Sidoarjo

Meskipun dalam hubungan dengan Nahdlatul Ulama sangat harmonis, namun dari pengurus PKB Sidoarjo sendiri tidak akan meninggalkan pendekatan dengan organisasi-organisasi yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama yang juga memiliki jumlah basis masa yang bisa dijadikan sebagai basis lumbung PKB Sidoarjo diantaranya adalah GP. Ansor, Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU, PMII, dan Banom NU lainnya⁶⁷. Meskipun demikian banom-banom tersebut berbeda dengan tim pemenangan yang sudah dibentuk oleh PKB Sidoarjo sehingga hal ini membutuhkan

⁵⁹ AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Mukhtamar Luar Biasa di Ancol, Jakarta Tanggal 2-4 Mei 2008, hlm. 14

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Maimun Siradj selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Desa Kedung Cangkring, tanggal 10 Maret 2021, bertempat di kediaman Bapak Maimun Siradj, Jabon, pukul 11.00 WIB

⁶¹ Wawancara dengan bapak Arly Fauzi selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Desa Sepande, tanggal 4 Maret 2021, bertempat di Ponpes Nurul Ikhlas Sidoarjo, pukul 10.40 WIB

⁶² Abd. A'la, *Pembaruan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal. 17

⁶³ Sahal Mahfudz "Prospek Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan" dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher (Ed), diterj. Shonhadji, *Dinamika Pesantren : Dampak Pesantren dalam pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, (Surabaya: Hikmah,

1995), hal.268

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Arly Fauzi selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Desa Sepande, tanggal 4 Maret 2021, bertempat di Ponpes Nurul Ikhlas Sidoarjo, pukul 10.40 WIB

⁶⁵ Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi (Internasionalisasi Politik Ulama dan Politik Bervisi Kepentingan Nasional)*. op. cit. hlm 14-15

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Khalim selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Kelurahan Sidokare, tanggal 9 Maret 2021, bertempat di Kantor DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, pukul 09.00 WIB

⁶⁷ Miftahul Ulum, *Tradisi Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia*, Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm 139

bahwa kegiatan kelembagaan yang dilakukan oleh banom-banom NU tersebut sekali lagi tidak mencerminkan pola politik NU di Sidoarjo⁶⁸. Proses pengerakan yang dilakukan oleh Banom Nu ini juga memiliki banyak strategi pendekatan, yakni melalui pendekatan yang bersifat individualistic dan lembag⁶⁹. Pendekatan bersifat individual dilakukan menggunakan metode pertemanan antara pengurus PKB Sidoarjo, Tim Pemenangan PKB dan Pengurus Banom NU tersebut, sehingga dalam metode pendekatan tersebut seringkali mengalami keberhasilan dengan kalkulasi yang begitu besar.

Organisasi sayap PKB di Sidoarjo juga sangat mempunyai dampak bagi PKB di Sidoarjo. Organisasi ini adalah GEMASABA (Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa) dan Perempuan Bangsa. Gemasaba juga memiliki tujuan untuk memenangkan PKB di Sidoarjo melalui basis kemahasiswaannya, karena seperti diketahui di Sidoarjo terdapat beberapa kampus besar dan ternama seperti UNUSIDA, UNSURI, AL-Khozini, UMAHA yang dijadikan sebagai lumbung pergerakan dari sayap PKB tersebut. Gemasaba sangat berorientasi kepada kemenangan PKB melalui basis pemilih milenialnya yang masih mempunyai tingkat realitis yang sangat tinggi di Sidoarjo sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisasi gemasabanya PKB Sidoarjo⁷⁰.

PKB Sidoarjo juga memiliki perempuan bangsa yang juga merupakan organisasi sayap yang dimiliki oleh PKB Sidoarjo. Perempuan bangsa yang dimiliki oleh PKB tersebut sebenarnya juga termasuk ke dalam banom NU baik tergabung dalam Fatayat ataupun Muslimat, namun dalam realitas dilapangan antara perempuan bangsa dan Banom NU sama sama dalam orientasi kemenangan PKB di Sidoarjo⁷¹. Oleh karena itu gerakan tersebut menjadi dasaran penting bagi proses terwujudnya demokrasi yang adil dan memberi pengaruh besar bagi perempuan dan khususnya bagi kemenangan PKB Sidoarjo⁷². Namun juga dalam proses gerakan perempuan tersebut tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diekspetasikan, banyak sekali cobaan dan tantangan yang dihadapi karena pada kultur perempuan di Sidoarjo ketika perempuan berbicara mengenai politik masih belum mendapatkan respon antusiasme yang tinggi karena pandangan terhadap perempuan yang berpolitik masih sangat kotor⁷³.

G. Kekuasaan PKB Sidoarjo di Eksekutif dan Legislatif

Keberhasilan yang telah dicapai ini merupakan sebuah bentuk upaya mempertahankan legitimasi kyai dan ulama sebagai bagian dari control terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, baik dari segi sosial, keagamaan maupun politik. Hal ini ditunjukkan oleh bagaimana proses penentuan calon Bupati dan Wakil Bupati di Sidoarjo yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa ini juga bagian dari proses konsolidasi dan konsultasi terhadap para kyai dan ulama di Sidoarjo⁷⁴. Pencapaian yang telah dilakukan ini sekaligus mencatatkan sejarah gemilang bagi PKB di Sidoarjo karena belum ada satu partai politik yang mampu menjadi pesaing dalam kontestasi pilkada tersebut, karena belum mampu mengadaptasi diri sebagai bagian dari kultur yang ada di Kabupaten Sidoarjo yakni lingkungan pesantren dengan aliran terbesarnya yakni Ahlussunnah Wal Jamaah⁷⁵.

PKB Sidoarjo mulai Pilkada Tahun 2005 mampu memenangkan calonnya tanpa koalisi dengan partai lain, yang membuat kebijakan di lingkungan Eksekutif ini tidak menerima intervensi dari pihak manapun, terkecuali dari Organisasi Nahdlatul Ulama Sidoarjo yang sangat memiliki pengaruh dan andil besar bagi kemenangan PKB di Sidoarjo⁷⁶. Nahdlatul Ulama di Sidoarjo mempunyai porsi besar bagi terciptanya kebijakan yang akan dibuat oleh Bupati yang berasal dari PKB Sidoarjo. Hal ini dikarenakan hubungan dan sinergitas antara NU dan PKB sudah dimulai semenjak pengusulan calon hingga melakukan control terhadap kemenangan PKB, sebelum Bupati membuat sebuah kebijakan tentunya sebelum daripada itu, Bupati yang berangkat dari PKB ini melakukan audiensi dengan para ulama dan kyai NU di Sidoarjo untuk turut juga menyalurkan aspirasi NU di lingkungan Pemerintah Daerah Sidoarjo.

Hubungan antara Partai Kebangkitan Bangsa di lingkungan Eksekutif dan di lingkungan Legislatif harus harmonis karena hal ini menentukan kebijakan-kebijakan yang akan disahkan. Dalam praktek dilapangan memang antara PKB Eksekutif dan Legislatif ini mempunyai porsi pertemuan khusus guna membahas dan membicarakan mengenai rancangan kebijakan yang akan dibuat sehingga tidak menjadi sebuah miss komunikasi apabila sudah terdapat di dalam forum persidangan⁷⁷.

⁶⁸ Tsaniatul Azizah, *Kuasa Kiai Dalam Pemaknaan Politik Partai Kebangkitan Bangsa Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2, Mei 2012. hlm. 400

⁶⁹ Wawancara dengan Sahabat M. Hafidz selaku Ketua IPNU Kecamatan Wonoayu di Kelurahan Pucang, tanggal 30 Maret 2021, bertempat di Rolag Café Sidoarjo, pukul 14.00 WIB

⁷⁰ RMOL.ID.Gemasaba Sidoarjo Dorong Tokoh Muda NU Menangkan PKB, diakses dari <https://www.rmolid.id/read/2012/11/24/86760/Gemasaba-Sidoarjo-Dorong-Tokoh-Muda-NU-Menangkan-PKB>, pada tanggal 18 April 2021, pukul 22.19 WIB.

⁷¹ Rifah Zairina, Skripsi, *Profil Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PKB) Di Sidoarjo (Studi Terhadap Potensi PPKB Dalam*

Mendukung Program Pemenangan Pemilu Tahun 2004 Bagi PKB), (Surabaya:UNAIR, 2014), Hal. V

⁷² Ibid., hlm. V

⁷³ Ibid., hlm. V

⁷⁴ Tsaniatul Azizah, op. cit. hlm 401

⁷⁵ Juang Abdi Muhammad, op. cit. hlm 67

⁷⁶ KPU Kabupaten Sidoarjo, *Rekapitulasi Hasil Pemilihan Di Kabupaten Sidoarjo*, diakses dari <https://kpud-sidoarjo.kab.go.id/pages/perolehan-suara-hasil-pemilu-kpu-sidoarjo>, pada tanggal 21 April 2021, pada pukul 21.23

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Arly Fauzi selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Desa Sepande, tanggal 4 Maret

Pada pemilu tahun 2004-2014 PKB tidak pernah absen dalam hal menyetorkan perwakilannya menjadi DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah selalu diatas 10 orang dan secara tidak langsung menjdi satu satunya partai politik yang mendominasi di dalam pemilu di Sidoarjo. Pada penentuan ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan hasil akhir pada tahun 2004 dan 2014 selalu dimenangkan oleh PKB Sidoarjo dalam hal kemenangan menjadi ketua DPRD disusul partai-partai lainnya seperti Golkar, PDI-P, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS yang menjadi Wakil ketua, sehingga sangat dinamis dalam struktural di dalam pimpinan DPRD Sidoarjo. Berikut adalah struktural pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2004 sampai pada tahun periode 2014⁷⁸ :

Tabel 7. Daftar Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004-2014

NO	TAHUN PERIOD E	NAMA ANGGOTA DAN PARPOL	JABATA N
1	2004-2009	1 Drs. H. Arly Fauzi, S.H, M.H (PKB) 2 Drs. Sumi Harsono (PDI-P) 3 Jalaluddin Alham, S.Ip, M.Hum (Demokrat)	1 Ketua DPRD 2 Wakil Ketua 3 Wakil Ketua
2	2009-2014	1 H. M. Dawud Budi Sutrisno, S.H, M.Hum (Demokrat) 2 H. Abdul Kholik, S.E (PKB) 3.H. Khulaim Junaidi, SP (PAN-PKS) 4 Imam Supi'I (PDI-P)	1 Ketua DPRD 2 Wakil Ketua 3 Wakil Ketua 4 Wakil Ketua
3	2004-2019	1 H. Sullamul Hadi N, S.Thi (PKB) 2 Taufik Hidayat Tri Y (PDI-P) 3 M. Rifa'I (Gerindra) 4 Emir Firdaus, ST, MM (PAN)	1 Ketua DPRD 2 Wakil Ketua 3 Wakil Ketua 4 Wakil Ketua

Strategi pengamanan jabatan ketua tersebut juga secara tidak langsung mencoba menjaga kestabilan politik yang ada di DPRD Sidoarjo yang harus selalu mengedepankan nilai-nilai Pancasila dengan dasar utama yakni Ahlussunnah Wal Jamaah An Nahdiya, sehingga hal ini PKB selalu hadir dalam upaya menjawab tantangan tersebut. Proses pemilihan ketua DPRD pada periode 2004-2014, PKB Sidoarjo selalu menggunakan strategi pendekatan secara individu kepada kader-kader partai politik lainnya. Oleh karena itu PKB yang berada di DPRD Sidoarjo tidak akan menutup kemungkinan melakukan manuver politiknya untuk meraih simpati dari anggota parlemen partai lain yang juga lolos menjadi dewan tersebut⁷⁹. Dari strategi semacam itu PKB berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam proses pemilihan ketua DPRD Sidoarjo terhitung pada tahun 2004 dan 2014.

H. Dampak Kebijakan PKB Sidoarjo

Mayoritas kebijakan yang diusulkan dari PKB Sidoarjo telah berhasil menjadi sebuah perundang-undangan yang akan diterapkan ke masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, sehingga dalam hal ini PKB juga mempunyai strategi jarak jauh apabila kebijakan tersebut mendapat penolakan dan kritik dari masyarakat Sidoarjo. Mayoritas kebijakan yang telah diterapkan dan dilaksanakan oleh PKB Sidoarjo tentunya sangat banyak sekali, namun tetap ada satu atau dua kebijakan yang dihasilkan baik dari Eksekutif dan Legislatif yang harus menjadi patron penilaian masyarakat dari kebijakan-kebijakan lainnya. Sehingga dari patron penilaian tersebut dapat dijadikan dasar bagi PKB untuk dapat mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan ini mampu bermanfaat dan berpengaruh bagi masyarakat di Sidoarjo⁸⁰.

Ketika dampak yang sudah dievaluasi tersebut mendapatkan hasil yang berbeda dengan apa yang diharapkan tentu saja hal ini tidak dapat dibiarkan saja karena belum bisa berdampak secara langsung bagi masyarakat Sidoarjo. Dalam hal ini tentunya PKB akan secara cepat membuka kegiatan ruang public agar dapat mengetahui apa yang menjadi keresahan bagi masyarakat Sidoarjo sehingga tentu saja harapan-harapan tersebut digunakan sebagai komitmen PKB Sidoarjo untuk dapat menjadi partai yang dekat dengan masyarakat⁸¹.

Namun dalam periode kebijakan yang telah diterapkan oleh PKB Sidoarjo periode tahun 2004-2015 masih mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat Sidoarjo, terhitng ada 2 wacana besar yang selama periode tersebut menjadi agenda terbesar PKB Sidoarjo untuk kemudian

2021, bertempat di Ponpes Nurul Ikhlas Sidoarjo, pukul 10.40 WIB

⁷⁸ Buku Selayang Pandang DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2004-2014 oleh Kesekretariatan DPRD Kabupaten Sidoarjo

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Maimun Siradj selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Desa Kedung Cangkring, tanggal 10

Maret 2021, bertempat di kediaman Bapak Maimun Siradj, Jabon, pukul 11.00 WIB

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Khalim selaku Pengurus DPC PKB Sidoarjo Tahun 2002-2007 di Kelurahan Sidokare, tanggal 9 Maret 2021, bertempat di Kantor DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, pukul 09.00 WIB

⁸¹ Dadi Junaedi Iskandar, op. cit. hlm. 24

diterapkan guna kepentingan masyarakat. Kebijakan tersebut adalah Pembangunan Mall Pelayanan Publik dan pembangunan Rumah Sakit Sidoarjo Barat. 2 wacana besar tersebut belum mampu dihadirkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam model pengemasan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Sidoarjo. Pembangunan berhasil untuk MPP misalnya, rencana tersebut mengalami keberhasilan dalam hal pembangunannya namun masih belum memiliki esensi bermanfaat bagi Masyarakat Sidoarjo karena dianggap merupakan hal yang menghambur-hamburkan uang rakyat Sidoarjo.

Dominasi yang terlalu berlebihan bagi sebuah partai politik akan selalu dimanfaatkan oleh kadernya yang sedang memegang penuh kekuasaan untuk bertindak di luar garis hukum yang sudah ditetapkan, sikap tersebut akan menjadi boomerang bagi kekuasaan yang sedang diemban oleh PKB Sidoarjo apabila kader yang saat itu duduk di kekuasaan melakukan tindakan kriminal melawan hukum, contohnya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Sidoarjo terpilih periode tahun 2015-2020 yakni H. Saiful Illah S.H, M.Hum, Hal tersebut diawali karena memang kebijakan tersebut mendapatkan pengawasan lemah dari partai oposisi dari PKB Sidoarjo sehingga hal ini menjadikan sikap yang melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri dengan uang rakyat Sidoarjo.

I. Penutup

1. Kesimpulan

Setelah dibahas secara meruntut dan detail pada pembahasan diatas yang didasari oleh beberapa data dan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwasanya faktor terbesar dari proses perkembangan dan kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo sangat dipengaruhi oleh keterlibatan Organisasi Masyarakat terbesar di Sidoarjo dan Indonesia yakni Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Seluruh komponen yang termasuk dalam kategori Pemilu atau Pilkada sangat didominasi oleh pengaruh yang diberikan NU Sidoarjo kepada PKB Sidoarjo sehingga selama kurun waktu 2004-2015, PKB Sidoarjo masih belum memiliki saingan berat dari partai politik lain bahkan yang mempunyai ideologis sama yakni bernafaskan islam.

Dari keadaan demikian yang membuat strategi mutlak untuk mengamankan suara dan kemenangan di Kabupaten Sidoarjo tentu saja harus melibatkan NU sebagai pokok strategi utama, hal ini dikarenakan jumlah database dari warga NU yang hampir mencapai 220.000 sehingga perolehan suara dari PKB sendiri selalu diatas 300.000 dan menjadikan pemenang dari keseluruhan hajatan pemilihan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Hubungan yang dibangun oleh PKB Sidoarjo dengan NU Sidoarjo tidak hanya sebuah relasi antar lembaga, namun sudah dalam ranah yang lebih jauh yakni dalam implementasi cita-cita Pancasila dengan dasar utama yakni

Ahlussunnah Wal Jamaah. Dari faktor tersebut hubungan keduanya tidak hanya sampai pada kemenangan dalam urusan politik namun lebih juga membangun arah peradaban sosial keagamaan sebagai benteng terdepan untuk menjaga kedamaian melalui islam yang toleran.

PKB dan NU Sidoarjo merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam rentetan panjang sejarahnya karena masih dalam naungan satu pintu dan pernah untuk menopang satu dengan yang lainnya. Hasil dari hubungan baik antara NU dan PKB Sidoarjo ini terwujud dalam dominasi PKB di dalam lingkungan Eksekutif dan Legislatif di Sidoarjo terhitung kurun waktu tahun 2000-2015, di antara tahun tersebut PKB mengalami dominasi yang kuat sebagai partai politik dengan selalu menjadi dominasi perolehan suara pada Pilkada Sidoarjo dan menjadi partai dengan anggota dewan terbanyak pada DPRD Sidoarjo.

Dominasi yang sedang diraih oleh PKB Sidoarjo ini apabila tidak memiliki treatmet yang tepat maka hal ini akan berujung fatal pada sebuah konsolidasi penentuan kebijakan. Sebelum melangkah dalam pembahasan kebijakan kedua leading sector yang dipegang kendali oleh PKB Sidoarjo ini selalu melakukan komunikasi untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu agar kebijakan yang diambil nantinya adalah hakekat usulan dari PKB Sidoarjo dengan pertimbangan NU Sidoarjo dan tidak keluar dari koridor AD-ART dari PKB dan Nahdlatul Ulama pastinya.

2. Saran

Pembahasan mengenai kajian sejarah politik masih sangat minim dibahas dan dikaji didalam lingkungan akademik Universitas Negeri Surabaya terutama dalam perosoalan pembahasan mengenai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu peneliti mengajukan sebuah saran untuk dapat dijadikan saran kajian pustaka yang dapat digunakan untuk penelitian dan kajian yang relevan.

Penelitian ini membahas mengenai Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa Sebagai Kekuatan Politik Di Sidoarjo Tahun 2000-2015, dimana pada periodisasi itu PKB menjadi salah satu partai yang memiliki pengaruh besar di Kabupaten Sidoarjo sebagai partai pemenang secara berturut-turut baik dari segi Legislatif maupun Eksekutifnya. Sehingga dalam hal ini hubungan antara NU Sidoarjo dan PKB Sidoarjo menjadi penentu dari kondisi politik di Kabupaten Sidoarjo.

Hubungan antara NU dan PKB Sidoarjo sudah terjalin sejak berdirinya PKB sebagai peserta pemilu di tahun 1998, namun apabila membahas terlalu panjang mengenai sejarah panjang Nahdlatul Ulama maka akan sedikit mengurangi esensi pembahasan yang sangat mengerucut

guna mengetahui perkembangan PKB Sidoarjo sebagai kekuatan politik sejak tahun 2000-2015.

DAFTAR PUSTAKA

A. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Arly Fauzi, S.H, M.H Selaku Sekretaris DPC PKB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002-2007 dan Ketua DPRD Sidoarjo Tahun 2004-2009.

Wawancara dengan Bapak Khalim, S.Pd Selaku Pengurus DPC PKB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002-2007 dan Anggota DPRD Sidoarjo Tahun 2004-2009.

Wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Maimun Siradj Selaku Pengurus DPC PKB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002-2007 dan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Tahun 2004-2009.

Wawancara dengan Sahabat M. Hafidz Selaku Ketua IPNU Kecamatan Wonoayu.

B. BUKU

Iskandar Muhaimin. (2006). *Melampaui Demokrasi :Internasionalisasi Politik Ulama dan Politik Bervisi Kepentingan Nasional*. Yogyakarta:KLIK.R.

_____. (2007). *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Bangsa*. Yogyakarta:KLIK.R.

Manifesto PKB Melayani Ibu Pertiwi, Tim Kajian Lanskap Indonesia. Jakarta:Indonesia.

KPU RI. (2010). *Modul I Pemilih Untuk Pemula*. Jakarta:KPU RI.

Fauziah, Ida dkk. (2008). *Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Mukhtar Luar Biasa PKB Di Acol, Jakarta, 2-4 Mei 2008*. Jakarta: Sekjend DPP PKB.

Subhan, M dkk. (2020). *NU Sidoarjo*. Sidoarjo: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama Sidoarjo.

Kalla, Yusuf dkk. (2004). *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Buamona, Amril dkk. (2017). *Peta Jalan Kemenangan PKB 2019*. Jakarta: LPP DPP PKB.

Anam, Choirul. (2010). *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: PT. Duta Aksara Mulia.

Nahrawi, Imam. (2005). *Moralitas Politik Pkb (Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern)*. Malang: Averroes Press.

Noer, Deliar. (1980). *Gerakan Modern islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.

Salim, Hairus dkk. (1999). *Tujuh Mesin Pendulang Suara*. Yogyakarta: LKiS.

A'la, Abd. (2006). *Pembaruan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Oepen, M dan W.Karcher. (1995). *Dinamika Pesantren :Dampak Pesantren dalam pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*. (Shonhadji.Terjemahan). Surabaya: Hikmah.

DPRD Sidoarjo. (2004-2014). *Buku Selayang Pandang DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2004-2014*. Sidoarjo: Kesekretariatan DPRD Sidoarjo.

C. JURNAL

Azizah, Tsaniyatul. (2012). *Kuasa Kiai Dalam Pemaknaan Politik Partai Kebangkitan Bangsa Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2.

Jati, Wasisto. (2013). *Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama*. Jurnal Studi Islam.

Djafar, Massa. Dhakhiri, Hanif. (2015). *Struktur Politik Partai Kebangkitan Bangsa*. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 11, No. 1.

Romli, Lili. (2011). *Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian Di Indonesia*. Jurnal Politika, Vol. 2, No. 2.

Ulum, M. (2017). *Tradisi Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia*. Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 1, No. 1.

Iskandar, J. (2017). *Pentingnya Partisipasi dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 14, No. 1.

D. SKRIPSI

Abdi, J. (2017). *Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam Menjaga Elektabilitas Calon Kepala Daerah (Study Pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo*. (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang).

Subagtio, E. (2019). *Perjalanan Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1973-1984 (Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Partai Persatuan Pembangunan)*. (Skripsi, Universitas Negeri Surabaya).

Ridoi, M. (2016). *Kekuatan Figur Dalam Partai Politik (Studi Terhadap Abdurrahman Wahid Di Partai Kebangkitan Bangsa)*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah).

Zairina, Rifdah. (2014). *Profil Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) Di Sidoarjo (Studi Terhadap Potensi PPKB Dalam Mendukung Program Pemenangan Pemilu Tahun 2004 Bagi PKB)*. (Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya).

E. INTERNET

<http://portal.sidoarjokab.go.id/kabupaten-sidoarjo>

<https://www.kpu.go.id/index.php/home>

<https://www.pkb.id/page/sejarah-pendirian/>

<http://dpcpkbsidoarjo.com/index.php>

<https://www.nu.or.id/> <https://www.rmolid/>

<https://www.rmolid/>

